

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Intisari	x
Abstract	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Mengenai Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang	15
1. Pengertian Perikatan	15
2. Hubungan Antara Perikatan dan Perjanjian	17
3. Subyek Perikatan.....	19
4. Obyek Perikatan	19
5. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang.....	20
B. Tinjauan Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan.....	22
1. Asal-Usul Sejarah.....	22

2. Pengertian Pengawasan Ketenagakerjaan	23
3. Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	24
C. Tinjauan Mengenai Hubungan Industrial	25
1. Pengertian Hubungan Industrial	25
2. Pihak-Pihak Dalam Hubungan Industrial.....	27
D. Tinjauan Mengenai Upah	31
1. Pengertian Upah	31
2. Jenis-Jenis Upah	32
3. Upah Minimum	34
4. Cara Pembayaran Upah.....	36
E. Tinjauan Mengenai Kemanfaatan Dalam Hukum	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A . Sifat Penelitian	39
B . Jenis Penelitian.....	39
C. Pendekatan Penelitian	47
D. Analisis Data.....	47
E. Jalannya Penelitian.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja di PT Inkud Agritama	50
B. Kemanfaatan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Pada PT Inkud Agritama terhadap pekerja di PT Inkud Agritama.	60
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97

B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Provinsi Sumatera Barat	66
-------------------------------	----

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi

Sumatera Barat Berdasarkan Jabatan	69
--	----

Tabel 4.3 Standard Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Peraturan

Perundang-Undangan Ketenagakerjaan	75
--	----

Tabel 4.4 Laporan Kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan

83

Tabel 4.5 Laporan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan

84

Tabel 4.6 Capaian Kondisi Pengawasan Ketenagakerjaan

95